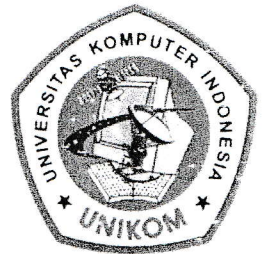


PROSIDING

Seminar Nasional dan *Call For Paper*



Kepemimpinan Dalam -
Politik dan Pemerintahan"

ISBN 978-602-73799-2-3



Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

Bandung, 9-10 Mei 2017

Prosiding Seminar Nasional *call for paper*

KEPEMIMPINAN
DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Unikom
2017

Prosiding Seminar Nasional
call for paper
Kepemimpinan Dalam Politik dan
Pemerintahan.

xii + 658 halaman (21 x 29 cm)

Penulis :
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

ISBN :
978-602-73799-2-3

Tim Editor :
Ketua : Nia Karniawati
Anggota : Dewi Kurniasih, Poni Sukaesih K, Tatik Fidowaty,
Rino Adibowo, Tatik Rohmawati, Andi Pratama.

Desain Sampul :
Fulky Hariyyan

Penerbit :
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

Redaksi :
Jl. Dipati Ukur No.112-116 Bandung 40132
Telp. (022) 2504119
Email : ip@email.unikom.ac.id

Cetakan pertama, Mei 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bissmilahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabaraktuh

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah, rahmat dan hidayahNya, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dapat menyelenggarakan Seminar Nasional *Call for Paper* pada tanggal 9 Mei 2017 dan menghasilkan *Proceeding* ber-ISBN.

Seminar Nasional *Call for Paper* ini mengangkat tema Kepemimpinan Dalam Politik dan Pemerintahan. Dengan sub tema yaitu (1) Kepemimpinan (2) Demokrasi (3) Manajemen Pemerintahan (4) Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (5) Budaya Politik (6) Pemilihan Umum (7) Birokrasi (8) E-Government (9) Pemerintah Daerah (1) Pelayanan Publik.

Seminar ini diikuti oleh dosen, peneliti, praktisi, birokrat, dan pemerhati pemerintahan dari lembaga pendidikan dan pemerintahan yang ada di Indonesia.

Penghargaan yang setinggi-tinggi nya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Prosiding ini, terima kasih atas kerja keras dan kerja samanya. Mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabaraktuh

Bandung, 9 Mei 2017

**Ketua Tim Editor,
Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.**

SAMBUTAN KETUA PANITIA SEMINAR NASIONAL *CALL FOR PAPER* 2017 PRODI ILMU PEMERINTAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabaraktuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan karunianya kepada kita semua sehingga kita bisa mengadakan Seminar Nasional dan *Call For Paper* dengan tema "Kepemimpinan dalam Politik dan Pemerintahan" yang kali ini di adakan di Auditorium Unikom, terdiri dari sub tema Kepemimpinan, Demokrasi, Manajemen Pemerintahan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Budaya Politik, Pemilihan Umum, Birokrasi, *Elektronic Government (E-Gov)*, Pemerintahan Daerah, dan Pelayanan Publik. Tema ini diharapkan dapat menghasilkan ide, gagasan atau pemikiran tentang Ilmu pemerintahan pada umumnya dan kepemimpinan dalam bidang politik dan pemerintahan khususnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena salah satu kunci suksesnya pelaksanaan sebuah instansi pemerintah adalah pemimpin yang berkualitas.

Seminar nasional dan *Call For Paper* ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya yang di adakan oleh Program studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom yang diikuti oleh para dosen, peneliti, pengamat politik dan pemerintahan, birokrat dan mahasiswa. Seminar ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap proses pemilihan pemimpin yang selalu kita lakukan selama 5 tahun sekali melalui pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif.

Semoga pelaksanaan Seminar Nasional dan *Call For Paper* ini memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada kita semua terkait kepemimpinan dalam politik dan pemerintahan. Jangan pernah berhenti berusaha mewujudkan Negara Indonesia yang lebih baik.

Akhir kata, kami selaku panitia pelaksana Seminar Nasional dan *Call For Paper* mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila terjadi salah-salah kata dan penerimaan kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada seminar nasional selanjutnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabaraktuh

Bandung, 9 Mei 2017

**Ketua Panitia Seminar Nasional *Call for Paper*
2017 Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom**

Tatik Fidowaty, S.IP.,M.Si.

SAMBUTAN
KETUA PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP Unikom

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabaraktuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Alhamdulillah *robbal alamiin*, atas berkah rahmat dan hidayah Allah SWT, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dapat kembali menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema: **KEPEMIMPINAN DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN**. Tema ini sengaja dipilih karena Indonesia pada tiga tahun terakhir ini sedang mengadakan pemilihan umum baik di tingkat pusat maupun daerah. Sudah sewajarnya semua akademisi, peneliti, praktisi, pengamat politik dan mahasiswa turut mengamati tahun pemilihan umum ini.

Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan seminar nasional ini, sehingga berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga hasil kegiatan ini dapat menjadi sumbangan rekomendasi untuk menciptakan pemimpin-pemimpin Indonesia yang hebat. *Aamiin yaa robbal alamiin..*

Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabaraktuh

Bandung, 9 Mei 2017
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Unikom

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.

SAMBUTAN DEKAN FISIP UNIKOM

Seminar Nasional *Call for Paper* ini merupakan salah satu Program dari Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Ini merupakan tindak lanjut dari Visi Unikom, Visi FISIP Unikom, Visi Prodi Ilmu Pemerintahan dalam upaya menjadi kampus FISIP yang mengikuti dinamika global dalam pengejawantahkan pengabdian pada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan refleksi pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia.

Seminar Nasional *Call for Paper* ini menghasilkan prosiding yang terdiri dari artikel yang di tulis oleh mahasiswa S3, dosen, peneliti, praktisi, birokrat, dan pemerhati pemerintahan dari berbagai lembaga pendidikan dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Ini merupakan sumbangsih, kontribusi terhadap dinamika pemerintahan Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada para Pemakalah dan Partisipan yang telah berpartisipasi dalam acara ini, kepada panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan acara ini.

Bandung, 9 Mei 2017

Dekan FISIP Unikom

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,M.A.

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	iii
Sambutan Ketua Panitia	iv
Sambutan Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan	v
Sambutan Dekan FISIP Unikom	vi
Daftar Isi	vii
Susunan Acara Seminar Nasional & CFP Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom 2017	xii

TEMA:KEPEMIMPINAN DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

SUBTEMA KEPEMIMPINAN :

KEPEMIMPINAN <i>UWA</i> DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN TOWANI TOLOTANG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN <i>Herman Dema, Mulyana Hatta</i>	1 - 17
CITRA KEPEMIMPINAN RIDWAN KAMIL SEBAGAI PEMIMPIN HUMORIS (Studi Analisis Semiotika Pada Akun Instagram ridwankamil Periode 18 -26 Februari 2017) <i>Iwan Koswara, Pramono Benyamin</i>	13 - 29
KEPEMIMPINAN BERBASIS BUDAYA POLITIK BANGSA <i>Junardi Harahap</i>	30 - 34
PENGARUH SPIRITUALITAS REOG PONOROGO BAGI KEPEMIMPINAN CAMAT PONOROGO DI KABUPATEN PONOROGO <i>Muhadam Labolo dan Muhammad Riqqo Khadafi</i>	35 - 50
DEMOKRATISASI DESA MASA ORDE BARU: Bergesernya Nilai dan Sifat Pemimpin Desa Serta Pudarnya Motivasi Warga Untuk Menjadi Kepala Desa (Kasus Pemilihan Kepala Desa Di Sangiang Kecamatan Banjar Kabupaten Majalengka) <i>Utang Suwaryo dan Iyep Saefulrahman</i>	51 - 72
STRATEGI KEPALA DAERAH MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN <i>Yanhar Jamaluddin</i>	73 - 89
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	90 - 109

Dewi Kurniasih dan Aos Kuswandi

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN PASCA REFORMASI
Pipin Hanapiah 110 - 121

SUBTEMA DEMOKRASI :

**MARKETING POLITIK PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA BUKIT TINGGI**
Adil Mubarak 122 - 137

**KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA DAN WAJAH
HUBUNGAN DEMOKRASI, ISLAM SERTA KEPEMIMPINAN
POLITIK DI INDONESIA**
Indira Sabet Rahmawaty 138 - 150

**KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN DI DALAM KONTEKS
PERPOLITIKAN : Sebuah Analisis Makna Politik Bagi Kaum
Perempuan**
Rita Destiwati, Junardi Harahap 151 - 154

NAGARI Vs NEGARA DAN EKSPERIMEN DEMOKRASINYA
Tengku Rika Valentina, Utang Suwaryo 155 - 176

**REUNDERSTANDING GAGASAN DEMOKRASI MODEL
MINANGKABAU**
Irawati 177 - 194

SUBTEMA MANAJEMEN PEMERINTAHAN :

**ARAH, KOMPAS PEMERINTAHAN : Jalan Terjal Menuju
Pemerintahan Yang Terpercaya (*Trustworthy Government*)**
Andi Pitono dan Kartiwi 195 - 209

**PUBLIC PARTICIPATION FOR IMPLEMENTATION OF PNPM
MANDIRI PARIWISATA IN KARANG DIMA VILLAGE LABUHAN
BADAS SUBDISTRICT SUMBAWA REGENCY**
Elvira Mulya Nalien, Bintang Rizki Sakinah, dan Rea Indranata 210 - 221

**KAJIAN PENGUATAN PROFESIONALISME
SEKERTARIAT DPRD**
Lukman M Fauzi, Samugyo Ibnu Redjo 222 - 232

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI MEDIA DIGITAL (Kajian di Jawa Barat, Indonesia)**
Machroni Kusuma, Diah Fatma Sjoraida, Rully Khairul Anwar 233 - 245

**ANALISA KRITIS ATAS MOTIF POLICY COMMUNITY DALAM
KOLABORASI (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan Pusat
Pemerintahan Provinsi Lampung)**
Maulana Mukhlis 246 - 267

PENGUATAN KAPASITAS INDIVIDU DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG BATUBARA MELALUI DANA CSR DI KABUPATEN TABALONG <i>Muhammad Riduansyah Syafari</i>	268 - 286
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH (Studi Pada Kecamatan Ciater Hasil Pemekaran Dari Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Jawa Barat) <i>Rahman Mulyawan, Utang Suwaryo, Iyep Saefulrahman</i>	287 - 309
EVALUASI IMPLEMENTASI APLIKASI QLUE DI WILAYAH JAKARTA UTARA <i>Restu Rahmawati</i>	310 - 326
MANAJEMEN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR NDONESIA <i>Samugyo Ibnu Redjo dan Hasim As'ari</i>	327 - 352
MANAGEMENT SKILLS PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT <i>Herson Simbolon dan Samugyo Ibnu Redjo</i>	353 - 368
 SUBTEMA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK :	
PRAKTIK DIPLOMASI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAMBIL ALIH PENGELOLAAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) DIATAS KEPULAUAN NATUNA DARI SINGAPURA <i>Pramono Benyamin, Iwan Koswara dan Santika Swandari</i>	369 – 383
SINERGISITAS ANTARA PEMERINTAH KOTA DENGAN STAKEHOLDERS KEBENCANAAN DI KOTA PADANG DALAM UPAYA PENGURANGAN RESIKO BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI <i>Roni Ekha Putera dan Heru Nurasa</i>	384 – 405
URGENSI RESTRUKTURISASI PEMERINTAHAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA <i>Sigit Rochadi dan Baretha Rizka Tantiya</i>	406 – 424
SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG DENGAN KENADZIRAN DALAM MENGEMBANGKAN WISATA ZIARAH DI BANTEN LAMA <i>Titi Setiawati, Rina Yulianti</i>	245 - 439

SUBTEMA PEMILIHAN UMUM :

**KONDISI POLITIK ACEH DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2014
(Studi di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara)** 440 - 463
Bobby Rahman dan Azhar

DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU 464 - 477
Dede Sri Kartini

**SAUNG BEWARA PEMILU: Media Informasi
Pemilu dan Demokrasi di Kota Bandung** 478 - 489
Gumgum Gumilar dan Achmad Abdul Basith

SUBTEMA BIROKRASI :

**ANALISA JABATAN BAPPEDA
KAB. LIMA PULUH KOTA DI SUMATRA BARAT** 490 - 493
Ayuning Budiati

**POLITISASI BIROKRASI PEMERINTAHAN
DI INDONESIA PASCA REFORMASI** 494 - 509
Ratnia Solihah dan Siti Witianti

SUBTEMA E-GOVERNMENT :

**EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI DESA (SID)
BERBASIS WEB DI DESA TERONG
KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL** 510 - 520
Faria Ruhana, Riski Wulandari, Sari Humaira

**E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PERIJINAN
REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN
BANDUNG UTARA (KBU) PADA ASPEK TANGIBLES
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA BARAT** 521 - 540
*Nia Karniawati, Samugyo Ibnu Redjo, Utang Suwaryo dan
Rahman Mulyawan*

**SUBTEMA PEMERINTAH DAERAH :
TINJAUAN KRITIS POSISI KECAMATAN DALAM
TATA PEMERINTAHAN DAERAH** 541 - 559
Donald K Monintja

**ANALISIS PROSES ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA** 560 - 577
*Elza Zikra Muallimin, Ulung Pribadi, dan Dwian Hartomi Akta
Padma Eldo*

SUBTEMA PELAYANAN PUBLIK :

- URBAN FARMING “KAMPUNG BERKEBUN” SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG** 578 - 589
Henny Sri Mulyani R
- PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu)** 590 - 615
Titin Rohayatin, Tulus Warsito, Ulung Pribadi, Achmad Nurmandi
- PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN (Studi tentang Pelaksanaan Penegasan Status Kewarganegaraan Melalui Pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Migran Phiippina Selatan di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2010-2014)** 616 - 629
Burhan Nicde
- ANALISA KONTEMPORER PELAYANAN PUBLIK KTP-EL DALAM GOOD LOKAL GOVERNANCE DI INDONESIA** 630 - 647
Yeti Rohayati
- PENYELENGGARAAN PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN BERMOTOR** 648 - 658
Kurhayadi

**SUSUNAN ACARA
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PRODI ILMU PEMERINTAHAN UNIKOM 2017**

Waktu	Kegiatan	Pelaksana	Tempat
<i>Hari Pertama, Selasa 9 Mei 2017</i>			
07.00 - 08.00	Registrasi Peserta Rehat Kopi	Panitia	Lt.17 Lt.16
08.00 - 09.00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembukaan ▪ Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Unikom, Kilas Unikom ▪ Sambutan Ketua Pelaksana ▪ Sambutan Ketua Prodi IP ▪ Sambutan Dekan FISIP Unikom ▪ Sambutan Rektor Unikom (membuka Acara) ▪ Doa 	MC Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si Prof. Dr. H. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A Dr. Ir. H. Eddy Sceryanto Soegoto Tatik Rohmawati, S.IP., M.Si	Lt.17
09.00 – 09.30	Persembahan Sadaya Unikom	Tarian Tradisional & Rampak Gendang	Lt.17
09.30 – 11.45	Pemaparan <i>Keynote Speaker</i> dan Pembicara	<i>Keynote Speaker</i> Pemateri 1 Pemateri 2	Lt.17
11.45 – 12.00	Penyerahan Cenderamata dan Photo Bersama		LT.17
12.00 - 13.00	Sholat, Istirahat, Makan	Seluruh Peserta	Lt.16
13.00 - 14.30	Presentasi Pemakalah Sesi Pertama		Lt. 9
	Ruang 1	Presentasi 7 Pemakalah	9.013
	Ruang 2	Presentasi 7 Pemakalah	9.015
	Ruang 3	Presentasi 7 Pemakalah	9.019
	Ruang 4	Presentasi 7 Pemakalah	9.025
14.30 - 14.45	Rehat Kopi	Seluruh Peserta	Lt. 16
14.45 - 16.15	Presentasi Pemakalah Sesi Kedua		Lt. 9
	Ruang 1	Presentasi 7 Pemakalah	9.013
	Ruang 2	Presentasi 7 Pemakalah	9.015
	Ruang 3	Presentasi 8 Pemakalah	9.019
	Ruang 4	Presentasi 8 Pemakalah	9.025
16.15 - 16.30	Pemberian Penghargaan & Pembagian Sertifikat Penutupan	Ketua Panitia Tatik Fidowaty, S IP., M.Si. MC Protokoler	Lt. 17
<i>Hari kedua, 10 Mei 2017</i>			
07.00 - 08.00	Registrasi Peserta		Unikom
08.00 – 16.00	<i>City Tour</i>		Bandung
16.00 – 16.45	Penutupan		Unikom

**DEMOKRATISASI DESA MASA ORDE BARU:
Bergesernya Nilai dan Orientasi Pemimpin Desa
Serta Pudarnya Motivasi Warga Untuk Menjadi Kepala Desa
(Kasus Pemilihan Kepala Desa di Sangiang Kecamatan Banjar
Kabupaten Majalengka)**

Utang Suwaryo¹² dan Iyep Saefulrahman¹³

ABSTRAK

Seperti kesatuan masyarakat hukum lainnya yang ada di Indonesia, Desa Sangiang juga tidak dapat lepas dari kehendak negara. Arah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasinya harus dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang dibuat negara yang sentralistis dan uniformitas. Dampak yang muncul ternyata tidak hanya pada berkurangnya ruang dan kuasa dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa dan warganya, tetapi juga pada pergeseran kesakralan seorang pemimpin desa dan pudarnya motivasi warga untuk menjadi kepala desa. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait dengan demokratisasi yang berlangsung di Sangiang pada masa Orde Baru khususnya saat berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Untuk dapat menjawab tujuan penelitian tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi yang terbangun di Sangiang khususnya dalam pemilihan kepala desa lebih berbasis tradisi liberal yang mengarah pada demokrasi formalitas. Hal ini disebabkan dalam proses penanaman nilai demokrasi yang dilakukan negara lebih menekankan pada aspek prosedural dibanding substansi dalam berdemokrasi. Akibatnya demokrasi yang berjalan di Sangiang sebatas hanya untuk melaksanakan kewajiban desa pada negara. Ketentuan dalam kebijakan negara yang mengatur kekuasaan dan kedudukan kepala desa yang cenderung menjadi birokratis juga telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan orientasi dari seorang pemimpin desa di Sangiang yang pada akhirnya hal tersebut menyebabkan motivasi warga Sangiang untuk menjadi kepala desa pun memudar. Merujuk pada hal yang terjadi di Sangiang masa Orde Baru, sudah selayaknya pemerintah sekarang menjadikannya sebagai referensi dalam membangun demokrasi desa untuk dapat lebih bermakna dengan tidak hanya menekankan aspek prosedural semata tetapi juga menekankan aspek substansinya.

Kata Kunci: demokratisasi, desa, kepala desa

ABSTRACT

Desa Sangiang can not be separated from the will of the state considering its position as law community unit in Indonesia. The direction of village governance and democracy should be able to conform to a centralised policy of the state and its uniformity. As a result, the village have no longer eligible to control dan manage interests of village and its denizens, likewise, there have been a shift of sanctity of

¹² Guru Besar di Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP Unpad

¹³ Staf Pengajar di Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP Unpad / sef73rahman@gmail.com

village chief and a lack of denizens' motivation to obtain its position. This research is aimed at gaining a deep analysis of the democratisation in Desa Sangiang during the New Order era, particularly on the execution of Village Government Law Number 5/1979 (UU No.5 Tahun 1979) including its technical regulations. Qualitative approach adopted is to answer the aim of research through documentation and in-depth interview. This research seeks to show that during Village Chief election in Desa Sangiang there is an implementation of liberal tradition that leads to a formal democracy. It occurred due to the state perspective in internalising the democracy values tend to be more procedural than substantive that have formed the conformity of village to pay off its duties before the state. Subsequently, the state policy in adjusting the power of village chief have bureaucratically shaped the shift of values and characters of village chief itself. It also become one of the reason why the denizens' motivation to be a village chief in Desa Sangiang have decreased. This findings suggests it is proper that Government has to learn to what occurred in Desa Sangiang during the New Order era, in order to build a meaningful democracy in village through emphasizes the embodiment of substantive democracy than the procedural democracy.

Keywords: *democratisation, village, village chief*

PENDAHULUAN

Masa Orde Baru yang ditandai dengan perubahan arah kebijakan politik dan paradigma pembangunan nasional, membawa konsekuensi yang signifikan pada kondisi negara secara umum dan desa secara khusus terutama dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Harapan untuk mewujudkan stabilitas nasional setelah sebelumnya selalu terjadi konflik dengan puncaknya pada peristiwa pemberontakan 30 September 1965, menjadi dasar pertimbangan pemerintah yang berkuasa untuk menerapkan kebijakan yang sentralistis dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu dalam bidang politik—pemerintahan, pendekatan keamanan dipilih pemerintah untuk mendampingi kesejahteraan.

Di saat yang sama arus modernisasi yang dialirkan oleh negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, masuk dan menjadi basis nilai untuk pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di Indonesia. Keberhasilan negara-negara penggagas modernisasi dalam membangun negara dan mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan, menjadi daya tarik bagi pemerintah untuk juga menerapkannya dalam membangun ekonomi—politik negara. Semangat untuk segera menerapkannya semakin bertambah karena adanya bantuan dari negara pengusung baik pada aspek pembiayaan maupun teknologi dan juga tenaga ahlinya.

Perpaduan *political will* dan *good will* pemerintah dengan arus modernisasi tersebut menghasilkan suatu pola kebijakan negara yang mengarah pada pembangunan nasional dengan ekonomi sebagai basisnya. Dalam konteks